SALINANTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

 NOMOR 040/P/2015

TENTANG

PANITIA UJIAN NASIONAL TINGKAT PUSAT

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAN REPUBLIK INDONESIA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat Tahun Pelajaran 2014/2015; |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat;
 |
| MEMUTUSKAN : |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PANITIA UJIAN NASIONAL TINGKAT PUSAT TAHUN PELAJARAN 2014/2015. |
| KESATU | : | Membentuk Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat Tahun Pelajaran 2014/2015 yang selanjutnya disebut Panitia UN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. |
| KEDUA | : | Susunan Panitia UN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:1. Pelindung;
2. Pembina;
3. Penyelenggara; dan
4. Pelaksana, yang terdiri atas:
5. Pelaksana UN; dan
6. Pelaksana bidang:
7. administrasi dan keuangan;
8. sosialisasi, informasi, dan hubungan;
9. hukum dan organisasi;
10. perakitan dan penjaminan mutu soal;
11. penggandaan dan distribusi naskah:
12. pelaksanaan UN Computer- Based Test (CBT);
13. pengawasan pelaksanaan, dan pengaduan UN:
14. pendataan, penskoran, dan pelaporan hasil; dan
15. pemantauan dan evaluasi.
 |
| KETIGA | : | Tugas Panitia UN sebagai berikut:1. Pelindung:

menetapkan kebijakan umum dan arahan pelaksanaan UN.1. Pembina:

melakukan koordinasi antar kementerian dan unit pelaksana teknis serta memberikan arahan teknis pelaksanaan UN.1. Penyelenggara:
2. menelaah dan menetapkan kisi-kisi UN;
3. menelaah dan menetapkan naskah soal UN;
4. menyusun dan menetapkan POS pelaksanaan UN;
5. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pembentukan Pelaksana UN tingkat Pusat;
6. melakukan koordinasi persiapan dan pengawasan pelaksanaan UN secara nasional; dan
7. memantau, mengevaluasi dan menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan UN.
8. Pelaksana UN:
9. menyusun kisi-kisi UN;
10. memantau kesiapan pelaksanaan UN di daerah;
11. menyusun Petunjuk Teknis Pengawasan untuk penggandaan dan pendistribusian bahan UN ke pelaksana UN Tingkat Propinsi;
12. melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN;
13. mendistribusikan kisi-kisi soal UN;
14. menyusun dan merakit soal UN;
15. menjamin mutu soal UN;
16. menyiapkan master naskah soal UN;
17. melakukan koordinasi dengan Panitia Provinsi untuk pekerjaan pelelangan penggandaan dan pendistribusian bahan UN;
18. melakukan serah terima master soal ke perusahaan penggandaan bahan UN;
19. mengembangkan sistem database peserta UN;
20. mengirim *database* peserta UN SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, SMALB, dan Program Paket C ke Perguruan Tinggi;
21. mengembangkan sistem *database* penilaian akhir ujian sekolah, ujian akhir pendidikan kesetaraan, dan Ujian Nasional;
22. melakukan verifikasi dan pengawasan sistem komputerisasi;
23. melakukan pemantauan dan persiapan, pelaksanaan, dan selama proses pemindaian LJUN;
24. menerima hasil pemindaian dari Perguruan Tinggi untuk SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C, dan menerima hasil pemindaian dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha;
25. melakukan penskoran hasil UN;
26. menertibkan dan mendistribusikan surat keputusan bentuk blanko Ijazah dan SKHUN ke provinsi dan luar negeri;
27. mengirimkan Nilai UN ke provinsi dan luar negeri;
28. mengoordinasikan kegiatan pemantauan UN di daerah;
29. menganalisis hasil UN dan mengirimkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
30. mengevaluasi pelaksanaan UN dan membuat laporan pelaksanaan dan hasil UN kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui BSNP; dan
31. tugas-tugas lain yang diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.
32. Pelaksana bidang:
33. administrasi dan keuangan: mempersiapkan dan mengelola administrasi dan keuangan UN;
34. sosialisasi, informasi, dan hubungan masyarakat: melakukan sosialisasi pelaksanaan UN di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan serta masyarakat; menyebarluaskan informasi penyelenggaraan dan pelaksanaan UN;
35. hukum dan organisasi: mempersiapkan dan menangani aspek legal dan regulasi penyelenggaraan UN;
36. perakitan dan penjaminan mutu soal: melaksanakan perakitan dan penjaminan mutu paket soal dan menyiapkan master soal;
37. penggandaan dan distribusi naskah: melakukan verifikasi dan penetapan perusahaan percetakan, menentukan prosedur pengamanan percetakan, mengoordinasikan penggandaan, pengepakan dan distribusi naskah;
38. pelaksanaan UN Computer- Based Test (CBT): menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan UN CBT;
39. pengawasan pelaksanaan, dan pengaduan UN: mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan, menerima pengaduan, dan menindaklanjuti pengaduan;
40. pendataan, penskoran, dan pelaporan hasil: melakukan koordinasi pendataan, penskoran hasil pemindaian, dan pelaporan kehadiran UN; dan
41. pemantauan dan evaluasi: melakukan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan UN.
 |
| KEEMPAT | : | Pembina, Penyelenggara, dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. |
| KELIMA | : | Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan. |
| KEENAM | : | Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2015. |
|  |  | Ditetapkan di JakartaPada tanggal 26 Maret 2015MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,ANIES BASWEDAN |

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah

NIP195812011985032001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 040/P/2015

TENTANG

PELAKSANA UJIAN NASIONAL TINGKAT PUSAT TAHUN PELAJARAN 2014/2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA UJIAN NASIONAL TINGKAT PUSAT

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

| NO | NAMA/JABATAN | JABATAN DALAM KEPANITIAN UN |
| --- | --- | --- |
| I. Pelindung |
| Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
| II. Pembina |
| 1 | Sekretaris Jenderal  | Ketua |
| 2 | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan | Anggota |
| 3 | Direktur Jenderal Pendidikan Dasar | Anggota |
| 4 | Direktur Jenderal Pendidikan Menengah | Anggota |
| 5 | Inspektur Jenderal  | Anggota |
| 6 | Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama | Anggota |
| 7 | Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi | Anggota |
| 8 | Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri | Anggota |
| III. Penyelenggara |
| 1 | Ketua BSNP | Ketua Penyelenggara |
| 2 | Sekretaris BSNP | Sekretaris |
| 3 | Anggota BSNP | Anggota |
| IV. Pelaksana |
| 1 | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan | Ketua |
| 2 | Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang  | Wakil Ketua 1 |
| 3 | Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama | Wakil Ketua 2 |
| 4 | Sekretaris Balitbang | Sekretaris |
| 5 | Direktur Pembinaan SMA | Koordinator Bidang UN SMA dan Paket C |
| 6 | Direktur Pembinaan SMK | Koordinator Bidang UN SMK |
| 7 | Direktur Pembinaan SMP | Koordinator Bidang UN SMP dan Paket B |
| 8 | Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama | Koordinator Bidang UN MA/MTs |
| 9 | Direktur Pendidikan Katolik, Kementerian Agama | Koordinator Bidang UN SMAK |
| 10 | Direktur Pendidikan Kristen, Kementerian Agama | Koordinator Bidang UN SMTK |
| 11 | Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama | Koordinator Bidang UN Program Wustha |
| 12 | Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dikdas | Koordinator Bidang UN SMPLB |
| 13 | Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dikmen | Koordinator Bidang UN SMALB |
| 14 | Atase Pendidikan dan Kebudayaan/ Konsul Jenderal Kementerian Luar Negeri | Koordinator Pelaksanaan UN di masing-masing negara tempat bertugas |
| A. Bidang Administrasi dan Keuangan |
| 1 | Kepala Biro Keuangan | Koordinator |
| 2 | Kepala Bidang Keuangan, Balitbang | Wakil koordinator |
| 3 | Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Balitbang | Anggota |
| 4 | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UN | Anggota |
| 5 | Bendahara Pengeluaran Pembantu UN | Anggota |
| B. Bidang Sosialisasi, Informasi, dan Hubungan Masyarakat |
| 1 | Kepala Pusat Informasi dan Humas, Setjen | Koordinator |
| 2 | Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media | Wakil Koordinator |
| 3 | Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | Anggota |
| 4 | Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah | Anggota |
| 5 | Kepala Subbagian Data dan Informasi, Balitbang | Anggota |
| C. Bidang Hukum dan Organisasi |
| 1 | Kepala Biro Hukum dan Organisasi | Koordinator |
| 2 | Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud | Wakil koordinator |
| 3 | Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi | Anggota |
| 4 | Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Balitbang | Anggota |
| D. Bidang Perakitan dan Penjaminan Mutu Soal |
| 1 | Kepala Bidang Penilaian Akademik, Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang | Koordinator |
| 2 | Mira JosyFungsional Umum pada Puspendik | Wakil Koordinator |
| 3 | Malik AzisPerekayasa pada Puspendik | Anggota |
| 4 | Zul ArsiahPerekayasa pada Puspendik | Anggota |
| E. Bidang Pengadaan dan Distribusi Bahan UN |
| 1 | Kepala Biro Umum, Setjen Kemdikbud | Koordinator |
| 2 | Kepala Bagian Umum/Ketua Unit Layanan Pengadaan, Balitbang  | Wakil Koordinator Pengadaan |
| 3 | Kepala Bagian Tata Usaha Puspendik | Wakil Koordinator Penggandaan dan Distribusi |
| 4 | Ketua Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kemdikbud | Anggota |
| 5 | Pejabat Pembuat Komitmen UN | Anggota |
| 1. Bidang Pelaksanaan UN CBT
 |
| 1 | Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi | Koordinator |
| 2 | Kabid Penilaian Non Akademik, Puspendik | Wakil Koordinator |
| 3 | Handaru Catu BagusPeneliti pada Puspendik | Anggota |
| 4 | Demas DasaPeneliti pada Puspedik | Anggota |
| G. Bidang Pengawasan Pelaksanaan dan Pengaduan UN |
| 1 | Inspektur II Inspektorat Jenderal Kemdikbud | Koordinator |
| 2 | Sekretaris Inspektorat Jenderal | Wakil Koordinator |
| 3 | Ketua SPI Balitbang | Anggota |
| H. Bidang Pendataan, Penskoran, dan Pelaporan Hasil |
| 1 | Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan | Koordinator |
| 2 |  Kepala Bidang Analisis dan Sistem Informasi Penilaian, Puspendik | Wakil Koordinator |
| 3 | Haryo SusetyoFungsional Umum pada Puspendik | Anggota |
| 4 | Doddy Agung SantosoFungsional Umum pada Puspendik | Anggota |
| 5 | Kepala Bidang Data Satuan Pendidikan dan Proses PembelajaranPusat Data Statistik Pendidikan | Anggota |
| H. Bidang Pemantauan dan Evaluasi |
| 1 | Kepala Pusat Penelitian Kebijakan | Koordinator |
| 2 | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan | Wakil Koordinator |
| 3 | Kepala SubBagian Kepegawaian Puspendik | Anggota |

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah

NIP195812011985032001